

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

ANALISIS KESETARAAN GENDER
DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT MARENA DESA
PEKALOBEAN KECAMATAN ANGERAJA KABUPATEN
ENREKANG



HALIM JAILANTA
105951107916

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terima	08 / 09 / 2022
Nomor Surat	-
Jumlah exp.	1 Exp
Harga	Sumbangan Alumnus
Nama Penulis	-
No. klasifikasi	K/ 0049 / H/ 2200 HAL A.

PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan
Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan
Anggeraja Kabupaten Enrekang

Nama : Halim Jailanta

Stambuk : 105951107916

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

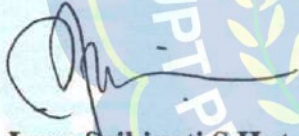
Makassar, Agustus 2022

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. Irma Sribianti, S.Hut., M.P., IPM

NIDN : 000701705


Dr. Ir. Hajiawa, M.P.,

NIDN : 0003066407

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi Kehutanan


Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd.

NIDN : 0926036803


Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM,

NIDN : 0011077101

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Analisis Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan
Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan
Anggeraja Kabupaten Enrekang

Nama : Halim Jailanta

Stambuk : 105951107916

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

SUSUNAN TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dr.Ir. Irma Sribianti,S.Hut.,M.P.,IPM
Pembimbing I

(.....)

Dr.Ir.Hajawa, M.P
Pembimbing II

(.....)

Ir. Naufal, S.Hut.,M.Hut.,MP
Penguji I

(.....)

Ir. Jauhar Mukti S.Hut., M.Hut., IPP
Penguji II

(.....)

Lulus: 2 Agustus 2022

ABSTRAK

Halim Jilanta, 105951107916. Analisis Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang bimbingan oleh **Hajawa dan Irma Sribianti.**

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan Hutan Adat Marena di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Mengetahui tingkat kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan adat yang ada di Hutan Adat, Marena, Desa Pekalobean Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini di laksanakan pada Masyarakat Hukum Adat di Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan Februari - April 2022 metode dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif hasil dari penelitian ini yaitu Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan adat Marena Secara totalitas persen kerja masih lebih banyak laki-laki yang berperan yakni 46.70% dan perempuan 36.60%. Sehingga, dapat disimpulkan laki-laki masih memegang peranan besar dalam kegiatan pengelolaan adat Marena. Tingkat kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan adat marena dapat ditinjau dari 3 aspek kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi laki-laki lebih aktif dibanding perempuan dalam berbagai jenis kegiatan pengelolaan hutan adat merena. Pada tapapan perencanaan untuk laki-laki 16.70% sedangkan pada perempuan sebanyak 10.00%. Demikian pula pada aspek pelaksanaan laki-laki lebih berperan penting sebanyak 30.0% dan perempuan 13.30% adapun pada aspek evaluasi terlihat jelas bahwa laki-laki juga banyak berperan 16.70% dan perempuan 13.30%. Secara keseluruhan laki-laki mempunyai peran lebih dalam pengelolaan hutan adat Marena yakni 63.00%, perempuan sebesar 37.00%. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak mengetahui tentang pengelolaan hutan adat Marena yang melalui persiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan kegiatan pemanenan dibandingkan dengan perempuan. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dilakuakn di sekitar kawasan hutan adat merena Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: Keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan adat Marena. Laki-laki mempunyai peran yang lebih besar dimulai dari kegiatan perencanaan terdapat laki-laki 5 orang atau 16.70% dan perempuan 3 orang atau 10.00% pada aspek pelaksanaan terdapat laki-laki sebanyak 9 orang atau 30.00% 4 orang perempuan atau 13.30% sedangkan pada aspek evaluasi terdapat laki-laki 5 orang atau 16.70% perempuan sebanyak 4 orang atau 13.30% Tingkat kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan adat Marena masih di dominasi oleh para laki-laki dengan persentase 63.00% sedangkan peran perempuan 37.00%.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Kesetaraan Gender, Hutan Adat.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Analisis Kesetaran Gender Dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Khaeriyah., M.Pd selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr.Hikmah, S.Hut., M.S.i., selaku Ketua Porodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr.Irma Sribianti, S.Hut.,MP,. selaku Dosen Pembimbing 1 (Satu) atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Dr. Ir. Hajawa, M.P selaku dosen pembimbing 2 (Dua) atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Ir. Naufal, S.Hut., M.Hut., IPM selaku penguji 1 (Satu) atas saran dan masukan yang telah diberikan.
6. Ir. Jauhar Mukti S.Hut., M.Hut, IPM selaku penguji 2 (Dua) atas masukan dan pembelajaran yang telah di berikan.
7. Segenap Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

8. Orang tua dan Saudara-saudara yang selalu memberikan semangat dalam hidup saya.
9. Terima kasih kepada seluruh warga Dusun Marena, Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan yang telah memberikan arahan dan izin penelitian kepada penulis.
10. Terima kasih kepada teman-teman saya dan keluarga besar angkata 016 atas semangat dan doanya.
11. Pemerintah Kabupaten Enrekang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan kegiatan penelitian di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Kami menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Makassar, Agustus 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Hutan Adat	6
2.2 Masyarakat Hutan Adat	7
2.3 Masyarakat Hukum Adat	9
2.4 Kesetaraan Gender	10
2.5 Profil Hutan Adat Marena	11
2.6 Kerangka Pikir	14
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat	15
3.2 Alat Dan Bahan	15
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	15
3.4 Jenis dan Sumber Data	16
3.5 Metode Pengambilan Data	16
3.6 Populasi dan Sampel	17

3.7 Metode Analisis Data	17
--------------------------------	----

BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis dan Demografis	19
4.1.1 Geografis	19
4.1.2 Iklim	19
4.2 Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya	19
4.2.1 Penduduk	19
4.2.2 Tingkat Pendidikan	20
4.2.3 Mata Pencarian	21
4.2.4 Pola Penggunaan Tanah	21
4.2.5 Kepemilikan Ternak	22
4.2.6 Agama dan Kondisi Sosial Masyarakat	22
4.2.7 Sarana dan Prasarana Desa	25
4.3 Pembagian Wilayah Desa	22

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden	24
4.1.1 Jenis Kelamin	24
4.1.2 Umur	25
4.1.3 Pendidikan	25
4.1.4 Pekerjaan Responden	26
5.2 Tingkat Keterlibatan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena	31
5.2.1 Tingkat Keterlibatan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Perencanaan	32
5.2.2 Tingkat Keterlibatan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Pelaksanaan	33
5.2.3 Tingkat Keterlibatan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Evaluasi	33

5.3 Tingkat Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena Desa
Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang 34

BAB. VI HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Kesimpulan.....36
6.2 Saran.....36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

NO	Teks	Hal
1.	Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan.....	20
2.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang	21
3.	Jenis Kelamin Responden Di Hutan Adat Marena.....	24
4.	Karakteristik Umur Responden Di Hutan Adat Marena	25
5.	Pendidikan Responden di Hutan Adat Marena	26
6.	Pekerjaan Responden	26
7.	Jenis Kegiatan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena.....	28
8.	Keterlibatan Laki-laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Perencanaan	31
9.	Yang Teterlibat Laki-laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Perencanaan	32
10.	Keterlibatan Laki-laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Pelaksanaan	32
11.	Yang Teterlibat Laki-laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Pelaksanaan.....	33
12.	Keterlibatan Laki-laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Evaluasi.....	33
13.	Yang Teterlibat Laki-laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Evaluasi.....	33
14.	Presentase Gender Dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena	34

DAFTAR GAMBAR

NO	Teks	Hal
1.	Kerangka Pikir.....	14
2.	Jenis Kegiatan Pengelolaan.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Teks	Hal
1.	Daftar Pertanyaan Untuk Responden	38
2.	Daftar Responden	39
3.	Data Jenis Kegiatan Responden	40
4.	Dokumentasi Penelitian	41



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan hutan secara umum terkesan sebagai area yang didominasi oleh laki-laki dan masalah gender dikerucutkan menjadi keprihatinan pada kaum perempuan. Pengarusutamaan gender sebagai sebuah konsep yang berdasarkan pengkajian kebutuhan khusus gender dan perencanaan tanggap gender dalam pengelolaan program hampir tidak diketahui sehingga tidak dilaksanakan. Kemunculan Hutan Adat tentu akan melibatkan masyarakat di sekitar hutan secara langsung. Terlibatnya masyarakat akan menimbulkan perbedaan, termasuk perbedaan gender. Dalam pengelolaan hutan laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda-beda, baik dalam pengelolaan hutan adat, yaitu tata kelola kawasan, tata kelolah kelembagaan dan tata kelolah usaha (Listya, 2017).

Selama ini peran perempuan dalam pengolahan sumberdaya hutan masih belum terlihat secara jelas dan dalam hal pengolahan hutan peran perempuan masih dikatakan kurang. Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi perempuan diragam kegiatan kehutanan serta dalam kehutanan skala besar masih kurang, sehingga gambaranya yang tepat mengenai keterlibatan perempuan sulit didapatkan. Hal ini menyiratkan bahwa peran perempuan dalam sektor kehutanan tidak terlihat (Cifor, 2013).

Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kesetaraan gender bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Kesetaraan gender adalah sebuah bentuk pengetahuan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis. Pemahaman mengenai kesetaraan gender diatas semakin menegaskan bahwa kesetaraan gender menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan (Keraf, 2002).

Masyarakat tradisional (adat) di Indonesia maupun di dunia lainnya, sering dijadikan sebagai tersangka utama atas terjadinya perusakan lahan hutan akibat sistem perladangan yang mereka lakukan. Namun jika diperlihatkan secara seksama, sesungguhnya sistem perladangan masyarakat tradisional ini tidak berpengaruh besar terhadap kerusakan hutan. Karena dalam kehidupan masyarakat tradisional ini terdapat juga aturan-aturan adat yang mengatur tentang sistem pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan tersebut (Barau, 2013).

Sejak tahun 1975 kawasan hutan adat Marena berada dalam penguasaan Dinas Kehutanan dan ditanami Pinus. Dulunya warga ikut menanam, namun kemudian tidak diperkenankan menebang dengan ancaman hukum. Pengelolaan hutan di Marena selama ini memang memiliki mekanisme adat tersendiri. Meski sempat tak berfungsi karena penguasaan pihak kehutanan. Hukum ini terutama berlaku di kawasan hutan lindung. Dihidupkannya kembali aturan adat efektif dalam menjaga eksistensi hutan lindung Marena. Apalagi pasca penempatan sebagai masyarakat adat ataupun hutan adat, mereka semakin percaya diri dalam mengelola hutan dengan aturan mereka sendiri. Pemerintah Daerah Endrekang akan terus memberikan dukungan kepada masyarakat adat Marena dan lainnya, termasuk dalam hal pengembangan ekonomi mereka melalui berbagai program pembangunan yang relevan. Masyarakat adat Marena juga merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur dan peningkat masyarakat dalam bertindak dan berperilaku hal yang menarik dari masyarakat ini ialah di era perkembangan zaman yang serba modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih akan tetapi mereka masih memiliki kataatan dalam menjunjung aturan adat istiadat di wariskan secara turun-temurun. Kesetaraan gender di hutan adat marena sangat berperan penting terutama dalam fungsinya sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan keberlangsungan ide-ide yang mengkonsepkan hal-hal paling bernilai dalam kehidupan

dan ruang lingkup yang terbatas. Dalam kesetaraan gender kawasan hutan, campur tangan lembaga adat sangat di perlukan sebagai pengendali atau pengontrol dalam pengelolaan tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang di sebabkan atau yang dapat menimbulkan sengketa atau konflik bagi warga masyarakat (Chandra Wahyu, 2019).

Setiap daerah atau etnis memiliki pola kesetaraan gender yang berbeda-beda. Kesetaraan gender yang ada pada masyarakat lokal terutama dalam pengelolaan hutan adat yang bersifat mempertahankan kelestarian hutan dimana hutan memberikan nilai konservasi terhadap kelangsungan ekosistem hutan adat nilai ekonomis terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan adat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang Analisis Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas adalah:

1. Bagaimana keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan Hutan Adat Marena di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana tingkat kesetaraan Gender dalam pengelolaan di Hutan Adat Marena, Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengelolahan Hutan Adat Marena di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

2. Mengetahui tingkat kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan adat yang ada di Hutan Adat, Marena, Desa Pekalobean Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi ilmu pengetahuan dan informasi mengenai pengelolaan hutan Adat Marena di Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat Adat Marena dalam mengelola hutan adat.
3. Sebagai bahan rujukan dan informasi bagi penelitian-penelitian hutan adat selanjutnya.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hutan Adat

Hutan adat adalah semua hutan yang ada di Indonesia yang berada di atas tanah yang di kuasai oleh Negara, yang pengelolaannya oleh masyarakat secara komunal yang proses terjadinya secara alamiah (Wiyono Agung, 1972).

Istilah hutan adat yang sudah baku dalam penyebutan untuk kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat desa baik dalam undang-undang kehutanan maupun dalam penggunaan oleh kalangan pengembang ternyata memiliki potensi untuk mendorong munculnya masalah ke depan. Dalam undang-undang kehutanan secara garis besarnya disebutkan bahwa hutan adat merupakan suatu kawasan yang dikelola oleh masyarakat adat dengan berpedoman pada institusi adat. Jika dicermati, dalam pengertian tersebut terkait di dalamnya masalah akses dalam mengelola, artinya bahwa seluruh komponen masyarakat memiliki hak dalam mengelola, artinya bahwa seluruh komponen masyarakat memiliki hak dalam mengakses kawasan hutan dimaksud. Hutan adat adalah seluruh hutan rimba yang bukan milik pribadi atau keluarga. Hutan adat berisi berbagai jenis kayu, buah-buahan, akar dan rotan serta dihuni oleh berbagai jenis binatang. Walaupun kebiasaan membuka lahan merupakan tradisi turun-temurun namun masyarakat tidak diperkenankan untuk membuka lahan seluas-luasnya (Adhiprasetyo, 2006).

2.2. Masyarakat Hutan Adat

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (Hakim, 2005). Secara factual di

setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hutan adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hutan adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertindak laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa. memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya (Soemarwato, 1992).

Pandangan dasar dari kongres 1 masyarakat adat nusantara tahun 1999 menyatakan bahwa “masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakat”. Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan, dan tempat tinggalnya megkategorikan masyarakat adat sebagai suku-suku asli yang mempunyai kondisi social budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain disebuah Negara, dan yang statusnya sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan mereka sendiri yang khusus ILO (Keraf, 2010).

Beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu 1) mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian, 2) mereka mempunyai garis keturunan yang sama yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut, 3) mereka mempunyai budaya yang khas, 4) mempunyai bahasa sendiri, 5) dan biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya (Keraf, 2010).

Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa. Suhandi mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional yaitu; 1) hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat, 2) sikap hidup dan tingka laku yang magis religious, 3) adanya kehidupan yang gotong royong, 4) memegang tradisi dengan kuat, 5) menghormati para sesepuh, 6) kepercayaan kepada pimpinan local dan tradisi, 7) organisasi kemasyarakatan yang relative statis, 8) tingginya nilai-nilai sosial. Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha menjaga nilai-nilai atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya (Ningrat, 2004).

2.3 Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), kemudian bersatu dalam kesatuan Negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka, berbagai masyarakat itu berdiam diberbagai kepulauan besar dan kecil yang hidup menurut hukum adatnya masing-masing (Hilman, 2003).

Soepomo dalam pidatonya tanggal 2 Oktober 1901 yang mengutip pendapat Van Vollenhover menyatakan : “bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang disukai oleh hukum itu, hidup

sehari-hari''. Menurut Soepomo, maka masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan yang berdasar lingkungan daerah (*territorial*), kemudian ditambah dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut, yakni *genealogi-territorial*. Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat. Masing-masing masyarakat hukum adat tersebut dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tinggi, bertingkat dan berangkai (R. Soepomo, 1977).

2.4 Kesetaraan Gender

Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku, Gender itu berasal dari bahasa latin "GENUS" yang berarti jenis atau tipe. Kemunculan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tentu akan melibatkan masyarakat di sekitar hutan secara langsung. Terlibatnya masyarakat akan menimbulkan perbedaan, terutama perbedaan *gender*. Dalam pengelolaan hutan laki-laki dan perempuan memiliki porsi peran yang berbeda-beda, baik dalam penentuan pekerjaan maupun kegiatan yang harus dijalankan dalam pengelolaan hutan, yaitu tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha (Listya, 2017).

Selama ini peran perempuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan masih belum terlihat secara jelas dan dalam pengelolaan hutan peran perempuan masih kurang. Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi perempuan diragam kegiatan kehutanan serta dalam kehutanan skala besar masih kurang, sehingga gambaran yang tepat mengenai

keterlibatan perempuan sulit didapatkan. Hal ini menyiratkan bahwa peran perempuan dalam sektor kehutanan tidak terlihat (CIFOR, 2013).

Kesetaraan *gender* merupakan salah satu tujuan pembangunan millennium atau Millennium Development Goals (MDG's). Millennium Development Goals (MDG's) atau tujuan pembangunan millennium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar dalam kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB. Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut melaksanakan komitmen tersebut untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup, serta mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan. Bila kesetaraan *gender* dalam pengelolaan hutan ini tercapai, maka akan membantu mewujudkan tujuan pembangunan millennium (Bappenas, 2009 dalam Suwardi, 2010). Namun jika dilihat dari yang terjadi di masyarakat sekitar hutan sekarang, perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengelolaan hutan. Sedangkan jika dilihat dari potensi yang ada, perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Suwardi 2010).

Gender biasanya dihubungkan dengan perbedaan peran dalam kegiatan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan umumnya perbedaan peran dibagi sebagai: kegiatan produktif, kegiatan reproduktif, kegiatan merawat masyarakat dan kegiatan politik masyarakat. Masyarakat yang terlibat bukan hanya kaum laki-laki saja, pada era emansipasi ini kaum perempuan juga dapat terlibat dalam kegiatan pengelolaan agroforestri dukuh demi tercapainya kesetaraan gender (Simatauwet et al., 2001).

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati 190 negara, dengan 17 goals yaitu ekonomi, sosial dan keanekaragaman hayati, Sustainable Development Goals

(SDGs) atau tujuan pembangunan semua negara. SDGs juga bertujuan untuk pembangunan lain yaitu ekonomi berkelanjutan dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati. Bagi Indonesia kesetaraan gender sudah cukup maju dan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (Bappenas 2009)

1. Peran gender

Peran Gender Peran gender berkaitan dengan peran yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Namun demikian masih banyak pembatasan adat dan norma masyarakat pada perilaku baik laki-laki maupun perempuan, yang diawali dari pelabelan atau stereotipe atau sub-ordinasi (penomorduuan), misalnya: a) Peran yang pantas dilakukan oleh perempuan adalah sektor domestik; peran yang pantas dilakukan oleh laki-laki adalah sebagai pemimpin dan pelindung keluarga, jadi laki-laki bertanggung jawab dan berperan di sektor publik. b) Stereotipe berdasarkan adat diidentikkan dengan peran sebagai berikut:

- 1) Peran perempuan dalam kegiatan domestik (masak, dandan, memuaskan kebutuhan seksual suami)
- 2) Posisi perempuan sebagai orang belakang dan nomor dua dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.
- 3) Peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan tulang punggung keluarga.
- 4) Laki-laki tabu melakukan pekerjaan domestik (cuci piring, cuci baju, dan memasak) karena itu "pekerjaan perempuan". Laki-laki melakukan pekerjaan perempuan dikhawatirkan dapat menurunkan derajat dan kewibawaan sebagai pemimpin keluarga.

Kondisi pembatasan norma masyarakat semacam itu menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan terperangkap, karena seharusnya ia dapat pergi untuk meningkatkan kualitas SDM-nya untuk kemudian dapat menempati posisi penting sebagai pemimpin masyarakat di kemudian hari (Sundawati et al.2008).

2. Pengambilan keputusan

Pengambilan Keputusan Keputusan adalah kesimpulan dari suatu proses untuk memilih tindakan terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Pengambilan keputusan adalah proses yang mencakup semua pemikiran dan kegiatan yang diperlukan guna membuktikan dan memperlihatkan pilihan yang terbaik. Oleh karena itu teori keputusan juga merupakan suatu teknik analisis yang berkenaan dengan pengambilan keputusan melalui bermacam-macam model (Manik 2003).

Seseorang yang melakukan pengambilan keputusan, pada dasarnya dia telah melakukan pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang tersedia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan atau pilihan yang tersedia bagi tindakan pengambilan keputusan itu akan dibatasi oleh kondisi dan kapasitas individu yang bersangkutan dan faktor eksternal misalnya lingkungan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan fisik, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan menurut Depdiknas (2007) yaitu:

1. Posisi/kedudukan

2. Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan, direncanakan atau dikehendaki, dan harus diselesaikan. Masalah tidak selalu dapat dikenali dengan segera, ada yang memerlukan analisis, ada pula yang bahkan memerlukan riset sendiri.

3. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat.

4. Kondisi adalah keseluruhan faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya-sumber daya.

5. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit (kesatuan), tujuan organisasi, maupun tujuan usaha, pada umumnya telah ditentukan.

Pada pengambilan keputusan, terdapat bermacam-macam dasar yang digunakan. Terry (1977) dalam Depdiknas (2007) menjelaskan dasar-dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat yang subyektif sehingga mudah terkena pengaruh.
2. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman seseorang maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung-ruginya dan baik-buruknya keputusan yang akan dihasilkan
3. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.
4. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi

kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.

5. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

2.5 Profil Hutan Adat Marena

Kawasan hutan adat Marena berada dalam penguasaan Dinas Kehutanan sejak tahun 1975. Pengelolaan hutan di Marena ini memang memiliki mekanisme adat tersendiri meski sempat tidak berfungsi karena penguasaan pihak kehutanan. Hukum ini terutama berlaku di kawasan hutan lindung. Dihidupkannya kembali aturan adat efektif dalam menjaga eksistensi hutan lindung Marena pasca penetapan sebagai masyarakat adat atau hutan adat pada 14 februari 2018, mereka semakin percaya diri dalam mengelola hutan dengan aturan adat mereka sendiri. Pemerintah daerah Enrekang akan memberikan dukungan kepada masyarakat adat Marena dan lainnya termasuk dalam hal pengembangan ekonomi mereka melalui berbagai program pembangunan yang relevan. Kawasan hutan adat Marena yang ada di Desa Pekalobean, Kecamatan Aggeraja, Kabupaten Enrekang, jaraknya sekitar 40 km dari ibu kota kabupaten. Sepanjang kawasan hutan tampak hamparan hutan pinus, tanaman itu ditanam pada tahun 1975, dalam rangka proyek reboisasi pemerintah. Di lokasi yang lebih tinggi dari hutan reboisasi, terdapat hutan lindung yang dikeramatkan warga Namanya *Perangiang*, artinya “yang didengar”. Tempat ini diyakini warga memiliki banyak situs purbakala, termasuk sebuah sumur yang dikeramatkan. Meski disebut hutan lindung kawasan

tersebut sebenarnya hamparan tanah yang dipenuhi bebatuan, gua-gua dengan sedikit saja tegakan pohon kecil di atasnya. Marena mencakup lima kampung, di bagian bawah Landotete, ke atas lagi ada Lembong, lalu Dale, di bawah hutan ada Paropo dan Batu Rape. Lima kampung itu digabung semua menjadi Marena Desa Pekalobean. Batas-batas wilayah adat, sebagian ditandai dengan batas batu, gunung dan sungai. Dari hasil pemetaan partisipatif AMAN Masserempulu yang diverifikasi Tim *Adhoc* pengakuan Masyarakat Adat Pemerintah Daerah Enrekang, luas wilayah adat Marena yang diakui 676,32 hektar (Chandra Wahyu, 2019).

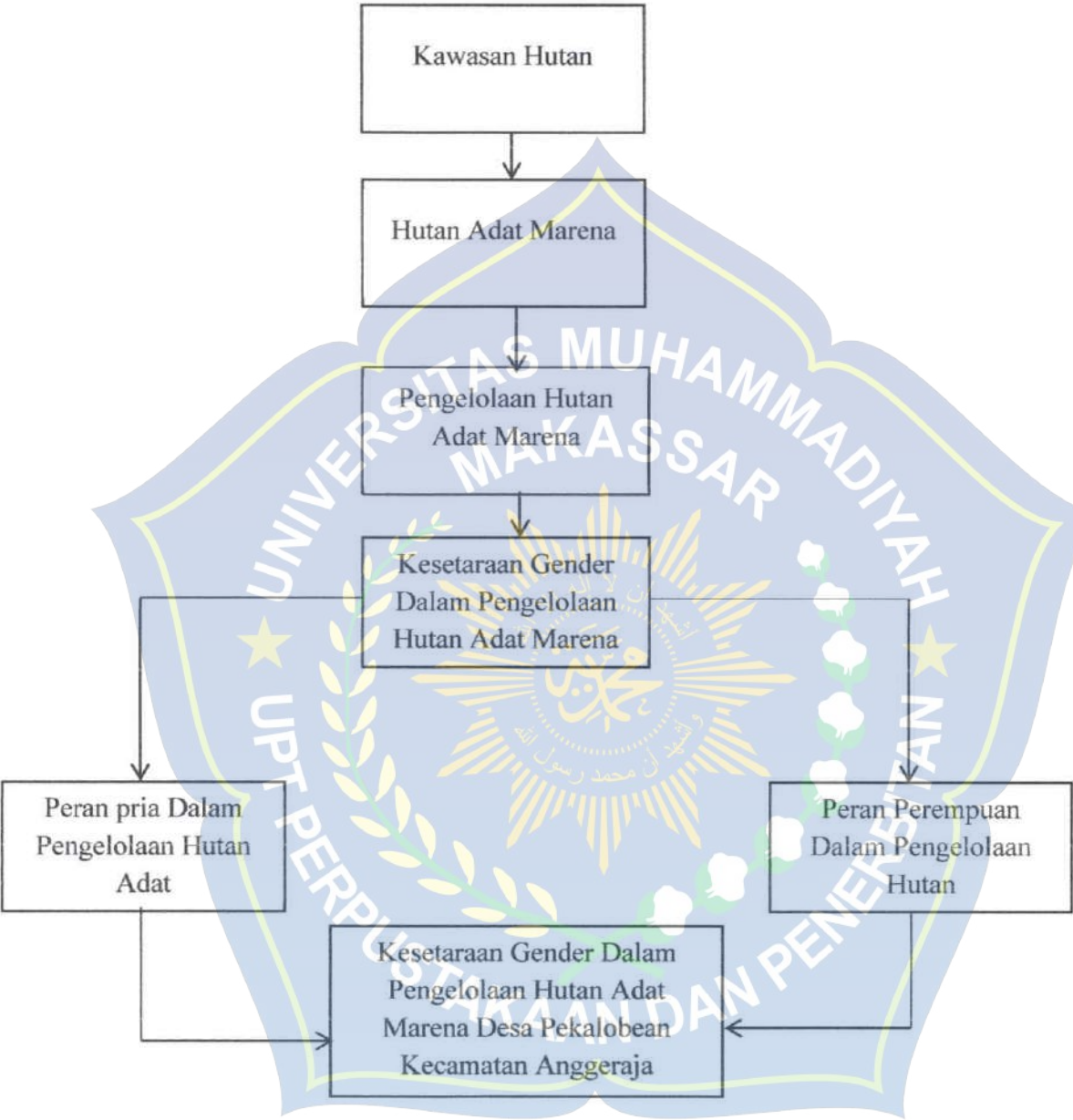
Pengelolaan hutan di Marena selama ini mangacu pada mekanisme adat yang disebut *Pamali*. Ini mencakup tiga aturan. Pertama, jika ada warga yang mengambil kayu di kawasan hutan lindung tanpa izin pemangku adat, dia akan diusir keluar dari kampung bersama kayu yang diambalnya. Hukuman ini adalah yang terberat. Kedua, jika terdapat warga yang membabat hutan untuk kepentingan apa pun tanpa seizin adat, dia tidak boleh menggunakan sumber air untuk semua lahan pertanian, Ini termasuk hukum menegah. Ketiga, jika terdapat warga yang merusak tanaman apa pun di kawasan hutan lindung, dia wajib memotong seekor kerbau *tedong pujuk*, (kerbau hitam berukuran besar). Kerbau ini akan dipotong secara adat dan kemudian dimakan bersama oleh seluruh warga, ini yang disebut *mengkado melo*, artinya yang sudah dibakar bisa tumbuh kembali, ini hukuman paling ringan. Untuk kayu lokal yang berada di sekitar pinus, kini bisa digunakan warga untuk keperluan membangun rumah, hanya saja mereka diwajibkan menanam pohon lain sebagai pengganti. Semuanya harus lewat adat, misalnya bagaimana kalau ada kayu yang tumbang apa bisa diambil begitu saja, itu bisa saja tetapi harus lewat musyawarah adat kalau menebang itu yang tidak bisa. Aturannya kalau mau tebang harus *nanam dulu*. Pasca mendapat penetapan pengakuan sebagai

masyarakat hukum adat, warga semakin percaya diri dalam mengelola hutan dengan aturan adat (Chandra Wahyu, 2019).

Dalam pengelolaan hutan adat diperlukan peran masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian hutan adat tersebut. Peran masyarakat dalam terwujudnya pembangunan kehutanan yang berkeadilan gender, baik dari segi perencanaan pelaksanaan dan pemanfaatan. Persepsi, sikap dan partisipasi laki-laki serta perempuan dibandingkan berdasarkan faktor internal berupa umur, tingkat pendidikan jumlah keluarga dan pekerjaan, serta faktor eksternal berupa penyuluhan. Dari pemikiran tersebut dapat di bentuk kerangka ber pemikiran secara sederhana yang ditujukan pada Gambar 1.



2.6 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Masyarakat Hukum Adat di Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan Februari - April 2022.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Catatan lapangan (field note), berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data atau informan. Digunakan selama penelitian di lapangan.
2. Kamera, digunakan untuk mengambil data berupa foto-foto kegiatan Masyarakat Hukum Adat Marena, fenomena lingkungan dan sesuatu yang dianggap mendukung penelitian.
3. Panduan kuisisioner yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pengumpulan data melalui proses wawancara terhadap responden.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah Kawasan Hutan Adat Marena di Dusun Marena, Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Sedangkan subjek penelitian ini adalah masyarakat sekitar Dusun Marena, Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, diperoleh dari pengamatan langsung ke lokasi Hutan Adat Marena dengan melakukan wawancara terbuka yang menggunakan serangkaian pertanyaan dalam bentuk kuisisioner. Meliputi identitas responden,

aktivitas responden dalam pemanfaatan hutan, kebijakan perlindungan hutan dan cara penanggulangan masalah dalam kegiatan perlindungan hutan.

2. Data sekunder, digunakan sebagai data penunjang data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lembaga-lembaga terkait yang mendukung penelitian ini. Terdiri dari kondisi fisik wilayah (letak dan luas, topografi dan iklim), dan keadaan sosial ekonomi penduduk (mata pencaharian, tingkat pendidikan serta sarana dan prasarana).

3.5 Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data dilokasi penelitian dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu :

1. Observasi lapangan, yaitu melihat langsung situasi dan kondisi yang ada di lapangan, guna mendapatkan gambaran yang nyata dari obyek yang diteliti.
2. Wawancara, dilakukan pada masyarakat yang melakukan aktivitas di dalam atau sekitar hutan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun.
3. Dokumentasi, berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data-data yang diperoleh. Metode dokumentasi yang akan dilakukan untuk mendapatkan dan memperkuat data-data terkait masalah penelitian dengan menggunakan data dokumentasi berupa foto-foto tentang aktifitas social Masyarakat Hutan Adat Marena dalam mengelolah hutan. Data fasilitas umum yang terletak dilokasi penelitian serta data mengenai kependudukan.

3.6 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Adat Marena.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pemuka adat dan perangkat adat (3 orang).
2. Masyarakat adat (26 orang).

3. Pemerintah setempat 1 orang (Kepala Desa).

3.7 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif, yang meliputi :

1. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan adat marena dengan melihat waktu yang digunakan oleh perempuan maupun laki-laki dalam melakukan kegiatan tertentu menggunakan rentang kriteria persentase penilaian sebagaiberikut :
 - a. Persentase keterlibatan laki-laki pada pengelolaan, Hutan Adat Marena.
 - b. Persentase keterlibatan yang digunakan perempuan pada pengelolaan Hutan Adat Marena.
2. Tingkat kesetaraan gender dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang diketahui pada kegiatan pengelolaan hutan adat marena seperti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Asumsi yang sama untuk mengetahui persentase kesetaraan gender juga menggunakan konsep dasar seperti formula di atas.

BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis dan Demografi

4.1.1 Geografis

Desa Pekalobean merupakan Desa yang berada pada Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Pekalobean terletak ± 31 Km dari Ibukota Kabupaten Enrekang, atau 7 Km dari Ibukota Kecamatan Anggeraja dengan luas wilayah $9,92 \text{ Km}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Salu Dewata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mataram
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bubun Lamba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Singki

4.1.2 Iklim

Keadaan iklim di Desa Pekalobean terdiri dari : musim hujan, kemarau, dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari sampai dengan Bulan April, musim kemarau antara Bulan Juli sampai dengan Bulan November, sedangkan musim pancaroba antara Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni.

4.2 Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

4.2.1 Penduduk

Penduduk merupakan salah satu syarat bagi terbentuknya sebuah Negara/wilayah atau sekaligus sebagai aset atau modal bagi suksesnya pembangunan disegala bidang kehidupan baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik. Oleh karena itu kehadiran dan perannya sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah, baik dalam skala kecil maupun besar, sehingga dibutuhkan data atau potensi kependudukan yang tertib dan terukur.

Desa pekalobean terletak di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang memiliki jumlah penduduk sebanyak ± 2.380 jiwa, terdiri dari laki – laki 1208 jiwa dan perempuan 1.172 jiwa dengan jumlah 573 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan

No.	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1.	Dusun Marena	454	451	905	210
2.	Dusun Pasang	233	203	436	110
3.	Dusun Malimongan	167	159	326	79
4.	Dusun Kota	219	222	441	106
5.	Dusun Sipate	135	137	272	68
Jumlah		1.208	1.172	2.380	573

Sumber: Data Statistik Desa Pekalobean, 2022.

4.2.2. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data sekunder, sebagian besar masyarakat Desa Pekalobean memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, yakni Sekolah Dasar (SD), hanya sedikit saja yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dan lebih banyak tidak tamat sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Tidak Tamat SD	667
2.	SD	578
3.	SMP	422
4.	SMA	472
5.	D3/S1	80
Jumlah		2.219

Sumber : Data Statistik Desa Pekalobean, 2022.

4.2.3. Mata Pencaharian

Jenis mata pencaharian masyarakat Desa Pekalobean antara lain yaitu petani, pedagang, PNS, buruh, wiraswasta, karyawan swasta, honorer, dan sopir. Akan tetapi masyarakat Desa Pekalobean lebih banyak mata pencahariannya sebagai petani. Masyarakat memanfaatkan lahan – lahan yang ada untuk ditanami bawang merah,

jagung, tomat, kol, wortel, ubi, kopi, dan lain – lain. Masyarakat juga sebagian mengembala ternak.

4.2.4. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan tanah umumnya digunakan sebagai lahan perkebunan dan pertanian (terutama bawang merah) dengan panen musiman.

4.2.5. Kepemilikan Ternak

Jenis ternak yang dikembangkan masyarakat yaitu ayam/itik, sapi, kambing, dan lain – lain. Dimana masyarakat lebih banyak mengembangkan ayam dibandingkan yang lain disebabkan karena masyarakat lebih mudah dalam memelihara ayam di bandingkan yang lain. Masyarakat hanya membuat kandang kecil dan disimpan di kolom rumah sedangkan untuk ternak lain membutuhkan tempat yang lebih besar.

4.2.6. Agama dan Kondisi Sosial Masyarakat

Semua masyarakat Desa Pekalobean beragama islam. Mengenai kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat berupa kerja bakti dalam pembangunan seperti memperbaiki jalan. Kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya yaitu tujuh belasan memperingati Hari Kemerdekaan RI dengan berbagai macam lomba.

Mata pencaharian masyarakat yang paling utama yaitu petani, dimana masyarakat memiliki sifat gotong royong yang tinggi untuk saling membantu terutama dalam hal membantu saat memanen.

4.2.7. Sarana dan Prasarana Desa

Desa Pekalobean memiliki sarana dan prasarana umum yaitu Kantor Desa, Balai Desa, Masjid, Sekolah, dan pada sektor kesehatan Desa Pekalobean memiliki sarana berupa puskesmas.

4.3 Pembagian Wilayah Desa

Desa Pekalobean terbagi atas 5 Dusun yaitu Dusun Marena, Dusun Pasang, Dusun Malimongan, Dusun Kota, dan Dusun Sipate. Jumlah penduduk $\pm$ 2.380 jiwa, yang terdiri atas laki – laki 1.208 jiwa, perempuan 1.172 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 573.



BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan gambaran umum mengenai latar belakang dan keadaan masyarakat hutan adat marena, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap 30 responden di hutan adat Marena diketahui bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, umur, dan pekerjaan.

5.1.1 Jenis kelamin

Karakteristik jenis kelamin dalam penelitian responden ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden Di Hutan Adat Marena

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	19	63.00
2	Perempuan	11	37.00
	Total	30	100

Sumber : Data primer setelah diolah, 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden dari 30 orang dengan persentase 100% total 19 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persen 63.00% sedangkan jumlah responden jenis kelamin perempuan 11 orang dengan persen 37.0%, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian jenis kelamin responden laki-laki lebih dominan dibandingkan jenis kelamin perempuan. Karena jenis kelamin laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan tenaga perempuan untuk melakukan aktivitas dalam pengelolaan hutan adat Marena.

5.1.2 Umur

Karakteristik umur berdasarkan jumlah 30 orang responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4. Karakteristik Umur Responden Hutan Adat Marena

No	Umur	Jumlah Responden	Persentasi %
1	20-29 Tahun	6	20.00
2	30-39 Tahun	12	40.05
3	40-49 Tahun	12	40.0
	Total	30	100

Sumber : Data primer setelah diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan bahwa dari 30 jumlah responden, terdapat 6 orang yang berumur 20-29 tahun dengan persen 20.0%, sedangkan 12 orang yang berumur 30-39 tahun dengan persen 40.0%, dan yang berumur 40-49 tahun ada 12 orang dengan persen 40.0%. rata-rata umur responden relatif masih produktif memiliki potensi yang cukup besar dalam pengelolaan hutan adat Marena. Hal ini dapat dilihat dari kondisi fisik yang masih baik sehingga memungkinkan melakukan berbagai kegiatan secara optimal.

5.1.3 Pendidikan

Berdasarkan karakteristik pendidikan respondendi hutan adat Marena Desa Pekalobean, Kecamatan Angeraja, Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5. Pendidikan Responden Di Hutan Adat Marena

No	Pendidikan	Jumlah	Persentasi %
1	SD	11	36.70
2	SMP	13	43.30
3	SMA	6	20.00
	Total	30	100

Sumber : Data primer setelah diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa dari 30 jumlah responden, terdapat 11 orang yang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan persen 36.70%. 13 orang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) persen 43.30%. sedangkan yang menempuh pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA) sebanyak 6 orang dengan persen 20.00%. pendidikan pada umumnya dapat mempengaruhi pola

berfikir masyarakat terutama dalam pengelolaan hutan adat perlu banyak pengalaman dan inofasi baru.

5.1.4 Pekerjaan Responden

Pekerjaan responden di Hutan Adar Marena Desa Pekalobean, Kecamatan Angeraja, Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6. Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Respondem	Persentasi %
1	Petani	18	60.00
2	Wira suasta	5	16.70
3	Ibu Rumah Tangga	7	23.30
	Total	30	100

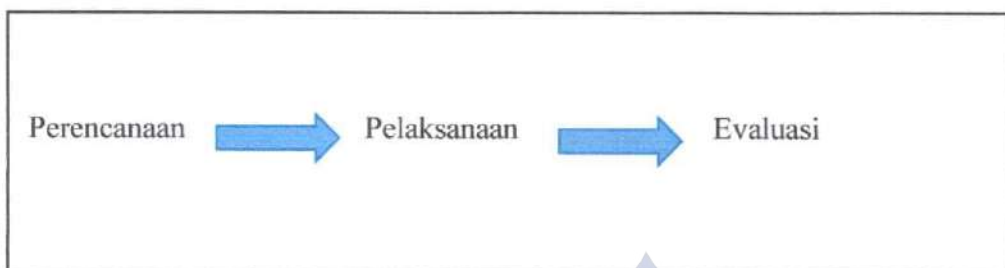
Sumber : Data primer setelah diolah, 2022

Berdasarkan pada Tabel 6 menunjukkan dari 30 responden 18 orang atau 60.00% yang berprofesi sebagai petani sedangkan 5 orang atau 16.70% yang berprofesi sebagai wirasuasta dan 7 orang yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan persen 23.30% .pekerjaan juga sangat mempengaruhi dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam pengelolaan hutan adat Marena.

5.2 Tingkat Keterlibatan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena

Tingkat keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari berbagai jenis kegiatan secara umum dalam pengelolaan hutan adat Marena melibatkan laki-laki dan perempuan yang masing masing mempunyai peran yang berbeda adapun jenis kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan adat Marena Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Gambar 2

Gambar 2. Jenis Kegiatan Pengelolaan



Sumber : Data primer setelah diolah, 2022

Pada Gambar 2 dapat dilihat proses pengelolaan Hutan Adat Marena yang diawali dengan kegiatan perencanaan pada kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menentukan berbagai jenis kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dikerjakan, selanjutnya kegiatan pelaksanaan dan kegiatan evaluasi.

Pada pengelolaan hutan adat harus terencana dengan baik melalui perencanaan strategi yang matang perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat hutan adat Marena dalam mengelola hutan adat. Perencanaan pengelolaan hutan adat adalah aktivitas yang dilaksanakan masyarakat hutan adat Marena untuk melaksanakan pembuatan daftar kerja yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini tahapan kegiatan perencanaan yang dilakukan dari hasil penelitian meliputi: musyawarah yang dilakukan oleh pemuka adat dan masyarakat sekitar kawasan hutan adat untuk menentukan perencanaan pengelolaan yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan dari hasil perencanaan dalam pengelolaan hutan adat Marena sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan pelaksanaan ini perlu ada komitmen dan komunikasi yang dibangun untuk mencapai tujuan yang maksimal.

Tahap evaluasi menjadi tahap terakhir dalam menilai tingkat keberhasilan pengelolaan hutan adat Marena. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari apa yang sudah direncanakan.

Tabel 7. Jenis Kegiatan Laki-laki dan Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Responden	Persentase %	Sum ber : Dat
1	Perencanaan	8	26.70	
2	Pelaksanaan	13	43.30	
3	Evaluasi	9	30.00	
	Total	30	100	

a primer setelah diolah, 2022

Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan adat Marena dapat dilihat pada Tabel 7. Secara totalitas persen kerja masih lebih banyak laki-laki yang berperan yakni 46.70% dan perempuan 36.60%. Sehingga, dapat disimpulkan laki-laki masih memegang peranan besar dalam kegiatan pengelolaan adat Marena.

5.2.1 Tingkat Keterlibatan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Perencanaan Hutan Adat Marena Desa Pekalobean, Kecamatan Angeraja, Kabupaten Enrekang

Tabel 8. Keterlibatan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kegiatan Perencanaan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	5	16.70%
2	Perempuan	3	10.00%
	Total	8	26.70%

Sumber : Data primer setelah diolah, 2022

Tabel 9. Yang tidak terlibat laki-laki dan perempuan dalam kegiatan perencanaan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	14	46.70
2	Perempuan	8	26.70
	Total	22	73.40

Sumber : data primer setelah diolah, 2022

Pada aspek perencanaan dalam satu periode pengelolaan dari 30 orang responden terdapat 8 orang yang terlibat dengan persen 26,70% .22 orang yang tidak terlibat dengan persen 73.37%. Kontribusi responden yang begitu sedikit baik laki-laki maupun perempuan lebih karena tidak semua petani merencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan pengerjaan lahannya. Semua berlangsung sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh petani. Sehingga dari 19 orang laki-laki yang terdapat pada responden

hanya 5 orang yang ikut dalam kegiatan perencanaan dengan persen 16.70%, dan dari 11 orang perempuan hanya 3 orang yang ikut terlibat dalam tahap perencanaan dengan persen 10.00%.

5.2.2 Tingkat Keterlibatan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Pelaksanaan Hutan Adat Marena Desa Pekalobean, Kecamatan Angeraja, Kabupaten Enrekang

Tabel 10. Keterlibatan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Pelaksanaan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	9	30.00
2	Perempuan	4	13.30
	Total	13	43.30

Sumber : data primer setelah diolah, 2022

Tabel 11. Yang Tidak Terlibat Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kegiatan Pelaksanaan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	9	30.00
2	Perempuan	8	26.70
	Total	17	56.70

Sumber : data primer setelah diolah, 2022

Peran laki-laki dan perempuan pada aspek pelaksanaan selama satu periode pengelolaan dari 30 responden terdapat 13 orang yang terlibat dengan persen 43.30% 17 orang yang tidak terlibat dengan persen 56.70%. Untuk laki-laki terdapat 9 orang dengan persen 30.00% sedangkan perempuan sebanyak 4 orang dengan persen 13.30%. Performa kerja laki-laki dan perempuan tetap masih lebih besar laki-laki. Hal ini wajar saja terjadi, karena pada tahap pelaksanaan lebih banyak pekerjaan fisik seperti menyiapkan lahan, menyediakan bibit, menanam memelihara, memanen, dan memasarkan. Sehingga, untuk pekerjaan fisik masih lebih dominan dikerjakan oleh laki-laki.

5.2.3 Tingkat Keterlibatan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kegiatan Evaluasi Hutan Adat Marena Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang

Tabel 12. Keterlibatan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kegiatan Evaluasi

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi %
1	Laki-Laki	5	16.70
2	Perempuan	4	13.30
	Total	9	30.00

Sumber : Data primer setelah diolah, 2022

Tabel 13. Yang Tidak Terlibat Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kegiatan Evaluasi

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi %
1	Laki-Laki	14	46.70
2	Perempuan	7	23.30
	Total	21	70.00

Su
mb
er :

data primer setelah diolah, 2022

Dari 30 orang responden terdapat 9 orang yang terlibat dengan persen 30,0% 21 orang yang tidak terlibat dengan presentase 70.0% pada aspek evaluasi untuk laki-laki 5 dengan persen 16.7% orang dan perempuan sebanyak 4 orang dengan persen 13.3%. Untuk aspek evaluasi masih tergolong rendah baik laki-laki maupun perempuan, karena tidak semua petani melakukan evaluasi setiap akhir periode pengelolaan. Dari Tabel 6 di atas, jelas menunjukkan peran laki-laki masih lebih besar dari pada peran perempuan dalam hal evaluasi.

5.3 Tingkat Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

Tingkat kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan adat marena dapat ditinjau dari 3 aspek kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Presentasi Gender dalam Pengelolaan Hutan Adat Marena

No	Jenis Kelamin	Jenis Kegiatan						Jumlah Responden	Persen %
		Perencanaan %		Pelaksanaan %		Evaluasi %			
1	Laki-Laki	5	16.70	9	30.00	5	16.70	19	63.00
2	Perempuan	3	10.00	4	13.30	4	13.30	11	37.00
Total		8	26.70	13	43.30	9	30.0	30	100

Sumber : Data primer setelah diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan bahwa laki-laki lebih aktif dibanding perempuan dalam berbagai jenis kegiatan pengelolaan hutan adat merena. Pada tapapan perencanaan untuk laki-laki 16.70% sedangkan pada perempuan sebanyak 10.00%. Demikian pula pada aspek pelaksanaan laki-laki lebih berperaan penting sebanyak 30.0% dan perempuan 13.30% adapun pada aspek evaluasi terlihat jelas bahwa laki-laki juga banyak berperaan 16.70% dan perempuan 13.30%.

Secara keseluruhan laki-laki mempunyai peran lebih dalam pengelolaan hutan adat Marena yakni 63.00%, perempuan sebesar 37.00%. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak mengetahui tentang pengelolaan hutan adat Marena yang melalui persiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan kegiatan pemanenan dibandingkan dengan perempuan.

BAB. VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dilakuakn di sekitar kawasan hutan adat merena Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan adat Marena. Laki-laki mempunyai peran yang lebih besar dimulai dari kegiatan prencanaan terdapat laki-laki 5 orang atau 16.70% dan perempuan 3 orang atau 10.00% pada aspek pelaksanaan terdapat laki-laki sebanyak 9 orang atau 30.00% 4 orang perempuan atau 13.30% sedangkan pada aspek evaluasi terdapat laki-laki 5 orang atau 16.70% perempuan sebanyak 4 orang atau 13.30%
2. Tingkat kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan adat Marena masih di dominasi oleh para laki-laki dengan persentase 63.00% sedangkan peran perempuan 37.00%.

6.2 Saran

1. Perlu adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sekitar hutan adat Marena agar dalam melakukan kegiatan pengelolaan keterlibatan laki-laki dan perempuan bisa setara sesuai dengan kemampuan kedua belapihak.
2. Di dalam kawasan hutan adat marena sebaiknya perlu diadakan kajian mengenai kesetaraan gender agar masyarakat tidak lagi saling mengharapkan dan membedakan laki-laki dan perempuan dalam melakukan pengelolaan hutan adat marena.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiprasetyo. 2006. Pengelolaan Hutan Sistem Masyarakat. <http://adhiprasetyo.blogspot.com>: Diakses pada tanggal 20 Maret 2013.
- Arikunto. S., 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi IV)*. P.T Rineka Cipta
- Barau B.A 2013. Kearifan Lokal Etnis Lokal Dalam Mendukung Kawasan Konservasi Taman Nasional Lore Lindu. *Studo Kasus Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Donggala*. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu.
- Bappenas. (2009). *Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor (Modul Gap Analysis)*. Retrieved Juni 17, 2014, from www.goodgovernance-bappenas.go.id.
- CIFOR. 2013. *Hutan dan Gender*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2017. www.cifor.org/forests-trees-agroforestry.
- Chandra, W, 2019. *Hutan Adat Marena*. Enrekang: Kearifan Lokal Yang Dapat Pengakuan Negara.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan.1999. [UU RI] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jakarta (ID): Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- Hakim A 2005; *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.
- Hilman, 2003 *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Cet. 2, Bandung: PT Mandar Maju, 2003, h. 105.
- Keraf.2002. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas.
- Keraf, S. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Listiya, Nur Azmi. 2017. *Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat Senggigi Kabupaten Lombok Barat*. Universitas Mataram.
- Ningrat, A.A. (2004). Karakteristik Lanskap Kampung Tradisional di Halimun Selatan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Sebuah Studi pada Kampung Kasepuhan di Kesatuan Adat Banten Kidul, Kampung Sirnaresmi, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat). Skripsi Sarjana pada Program Studi Arsitektur Lanskap FP IPB, Bogor.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1977, h. 51.
- Soemarwoto O, 1997 *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah mada university press, Yogyakarta, hlm 19.
- Suwardi.2010. Analisis Gender Dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat Dan Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapat Rumah Tangga (Kasus Hutan

Rakyat Di Desa Sukaresmi, Kecamatan Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Soekanto S, 2008 *Hukum Adat Indonesia*, Ed. I, Cet. 9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 91.

Simatauw M, Simanjutak L, Kuswardono PT. 2001. Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis. Wandita G, pengantar. Kupang : Yayasan PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal).

Sundawati L, D.R. Nurrochmat, L. Setyaningsih, H. Puspitawati, S. Trison.2008. Pemasaran Produk-produk Agroforestry. Kerjasama Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan World Agroforestry Center (ICRAF)

Wiyono Agung, 1972. Kehutanan Multi Pihak dan Langkah Menuju Perubahan. Jawa Tengah.



LAMPIRAN KUESIONER PENELITIAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Untuk Responden

Wawancara ini dilakukan hanya untuk kepentingan penelitian sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Kehutanan di Fakultas pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Jawaban dari hasil wawancara akan dirahasiakan, Terimakasih atas perhatian dan waktu yang telah bapak/ibu luangkan untuk menjawab pertanyaan yang kami berikan. Semoga apa yang bapak/ibu berikan bermanfaat.

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Agama :

Jenis kelamin :

Jumlah anggota keluarga :

Pekerjaan pendidikan :

Lama tinggal :

Peran dalam masyarakat :

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1		1. Apakah perlu hutan adat marena di kelolah oleh masyarakat? 2. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pengelolaah hutan adat marena? 3. Jika ya, kegiatan apa saja yang bapak/ibu lakukan? 4. berapa jenis tumbuhan yang di kelolah dalam kawasan hutan adat? 5. Jenis kegiatan apa yang bapak/ibu ikut dalam pengelolaan hutan adat marena Dan bentuk kegiatannya? 6. Apakah ada perlakuan khusus dalam melakukan pengelolaan hutan adat? 7. Berapa jam bapak/ibu melakukan kegiatan tersebut? 8. Apakah setiap hari bapak/ibu melakukan kegiatan tersebut? 9. Apakah perna ada hambatan dalam melakukan kegiatan tersebut? 10. Kegiatan apa saja yang di dominasi oleh laki-laki? 11. Kegiatan apa saja yang lebih di dominasi oleh perempuan? 12. Apakah hutan adat pernah disengketakan? 13. Apakah bapak/ibu punya kebun dalam hutan adat? 14. Jika ya, berapa luas?	1. Ya 2. Ya 3. Mengikuti rapat perencanaan pengelolaan 4. Kopi,ceengkeh jahe dll 5. Perencanaan dalam Rapat keanggotaan 6. Ada, selalu menjaga dan melestarikan hutan adat dengan cara mengelolah hutan dengan baik, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merusak hutan adat 7. 4 jam 8. 3 x seminggu 9. Tidak ada 10. Kegiatan yang melibatkan fisik 11. Pemanena 12. Tidak 13. Ada 14. 500 M

Lampiran 2. Daftar Responden

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan
1	Nur Hayati	Perempuan	35	SMP	Wirasuasta
2	Pak Pitrer	Laki-Laki	42	SD	Petani
3	Supriadi	Laki-Laki	30	SMP	Petani
4	Heryati	Perempuan	42	SD	Ibu Rumah Tangga
5	Rosmiati	Perempuan	40	SD	Ibu Rumah Tangga
6	Soehirman	Laki-Laki	44	SD	Petani
7	Jumiati	Perempuan	31	SMP	Wirasuasta
8	Hasnia	Perempuan	41	SD	Ibu Rumah Tangga
9	Siti	Perempuan	33	SMP	Ibu Rumah Tangga
10	Akbar	Laki-Laki	45	SD	Petani
11	Darman	Laki-Laki	22	SMA	Petani
12	Sawal	Laki-Laki	26	SMA	Petani
13	Suhardi	Laki-Laki	21	SMA	Petani
14	Asman	Laki-Laki	21	SMA	Petani
15	Ismail	Laki-Laki	29	SMA	Petani
16	Ase	Perempuan	42	SD	Ibu Rumah Tangga
17	Mariati	Perempuan	34	SMP	Wirasuasta
18	Tina	Perempuan	41	SD	Ibu Rumah Tangga
19	Hasnia	Perempuan	30	SMP	Wirasuasta
20	Kasim	Laki-Laki	31	SMP	Petani
21	Ahidin	Laki-Laki	38	SMP	Petani
22	Sunadi	Laki-Laki	43	SD	Petani
23	Syaripuddin	Laki-Laki	44	SD	Petani
24	Dasa	Laki-Laki	42	SD	Petani
25	Umar	Laki-Laki	43	SD	Petani
26	Kalip	Laki-Laki	41	SD	Petani
27	Sapri	Laki-Laki	31	SMP	Petani
28	Rukisa	Perempuan	35	SMP	Petani
29	Riska	Perempuan	30	SMP	Wirasuasta
30	Sudarman	Laki-Laki	23	SMA	Petani

Lampiran 3. Data Jenis Kegiatan Responden

No	Nama	Jenis Kegiatan		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1	Nur Hayati	✓	x	x
2	Pak Pitrer	✓	x	x
3	Supriadi	x	x	✓
4	Heryati	✓	x	x
5	Rosmiati	✓	x	x
6	Soehirman	✓	x	x
7	Jumiati	x	✓	x
8	Hasnia	x	✓	x
9	Siti	x	✓	x
10	Akbar	✓	x	x
11	Darman	x	x	✓
12	Sawal	x	✓	x
13	Suhardi	x	✓	x
14	Asman	x	✓	x
15	Ismail	x	✓	x
16	Ase	x	✓	x
17	Mariati	x	x	✓
18	Tina	x	x	✓
19	Hasnia	x	x	✓
20	Kasim	x	✓	x
21	Ahidin	x	✓	x
22	Sunadi	✓	x	x
23	Syaripuddin	✓	x	x
24	Dasa	x	✓	x
25	Umar	x	✓	x
26	Kalip	x	✓	x
27	Sapri	x	x	✓
28	Rukisa	x	x	✓
29	Riska	x	x	✓
30	Sudarman	x	x	✓

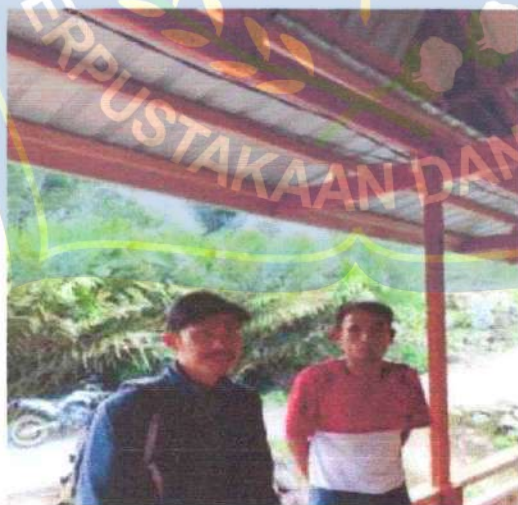
Lampiran 4 Dokumentasi penelitian



Gambar 1. kegiatan wawancara dengan ketua Adat Marena Desa Pekalobean



Gambar 2. Kegiatan Observasi Di Hutan Adat Marena



Gambar 3. kegiatan wawancara dengan masyarakat adat Marena Desa Pekalobean



Gambar 4. kegiatan wawancara dengan masyarakat adat Marena Desa Pekalobean



Gambar 5. kegiatan wawancara dengan masyarakat adat Marena Desa Pekalobean



Gambar 6. kegiatan wawancara dengan masyarakat adat Marena Desa Pekalobean

Lampiran 5 Hasil Turnitin BAB 1 – BAB VI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Akreditasi Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Telp (0411) 866972, 881593. Fax: (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Halim Jailanta

NIM : 105051107916

Program Studi : Kehutanan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	2 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	2 %	10 %
6	Bab 6	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 25 Juli 2022

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Hum, M.I.P

NIM. 964 591

AB I - halim jailanta 105951107916

ORIGINALITY REPORT

5%	2%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

WITH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

Submitted to Trisakti University

Student Paper

Include quotes

Include bibliography



AB II - halim jailanta 105951107916

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

FROM ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

d.123dok.com

Source

Include quotes

Include bibliography



AB III - halim jailanta 105951107916

ORIGINALITY REPORT

2

%

SIMILARITY INDEX

2

%

INTERNET SOURCES

0

%

PUBLICATIONS

0

%

STUDENT PAPERS

ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

documents.site

et Source

ude quotes

ude bibliography



AB IV - halim jailanta 105951107916

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

VIEW ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

digilib.unhas.ac.id

Internet Source

Include quotes

Include bibliography



AB V - halim jailanta 105951107916

ORIGINALITY REPORT

2%
SIMILARITY INDEX

2%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

VIEW ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

digilibadmin.unismuh.ac.id

Get Source

Include quotes

Include bibliography



AB VI - halim jailanta 105951107916

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

WITH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

include quotes
include bibliography



RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Pasaran, 29 April 1997. Penulis merupakan anak ke pertama dari tuju bersaudara dan merupakan buah hati dari pasangan **Jasman** dan **Nurlia**. Jenjang pendidikan penulis yang ditempuh yaitu masuk ke SDN 45 banca tahun 2003 sampai 2009. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTS Darul Istiqomah Timbuseng Gowa dan tamat pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA 45 Sossok dan tamat pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis lulus pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1) dan Alhamdulillah sesesai pada tahun 2022,

Selama jadi mahasiswa penulis juga aktif di berbagai organisasi eksternal maupun internal kampu sebagai pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Banca (IPMB) preiode 2017-2018 wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kehutanan (HMK) priode 2018-2019, Sekertaris Umum Badan Eksekutif Mahasisa (BEM) priode 2020-2021

Berkat petunjuk dan pertolongan allah SWT. Usaha dan disertai do'a kedua orang tua dalam menjalani aktifitas akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhmadulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripdi yang berjudul: "**Analisis Kesetaraan**